

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jayawijaya**



Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa bahwasannya Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 telah kami susun. Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden

Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyampaian laporan kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran serta perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan kinerja instansi pemerintah ini merupakan

kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran BPBD Kabupaten Jayawijaya.

Kami sadar bahwa laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi, kajian dan referensi sehingga kedepan kita dapat mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan kepada kita dengan hasil yang memuaskan, Amin.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Demikian laporan ini disampaikan semoga bermanfaat khususnya bagi BPBD Kabupaten Jayawijaya dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wamena, 31 Januari 2024

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Kabupaten Jayawijaya



EDISON WETIPO, S.H.

NIP. 9731028 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I, PENDAHULUAN.....	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5
D. ISU STRATEGIS	5
BAB II, PERENCANAAN KINERJA	7
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA	8
BAB, AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
BAB, PENUTUP	27
Lampiran-Lampiran	
1. IKU	
2. Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

1. Maksud Laporan

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas BPBD;
- b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola BPBD;
- c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
- d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalamr angka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Tujuan Laporan

- a. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas BPBD kepada Bupati;
- b. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPBD;
- c. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan BPBD.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Jayawijaya berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B.1 Kedudukan

Badan Penanggulan Bencana Daerah merupakan unsur

penunjang urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dipimpin oleh Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah Kepala badan ex Officio Sekretaris Daerah dalam Pelaksanaan Operasional dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas penanggulangan bencana Daerah.

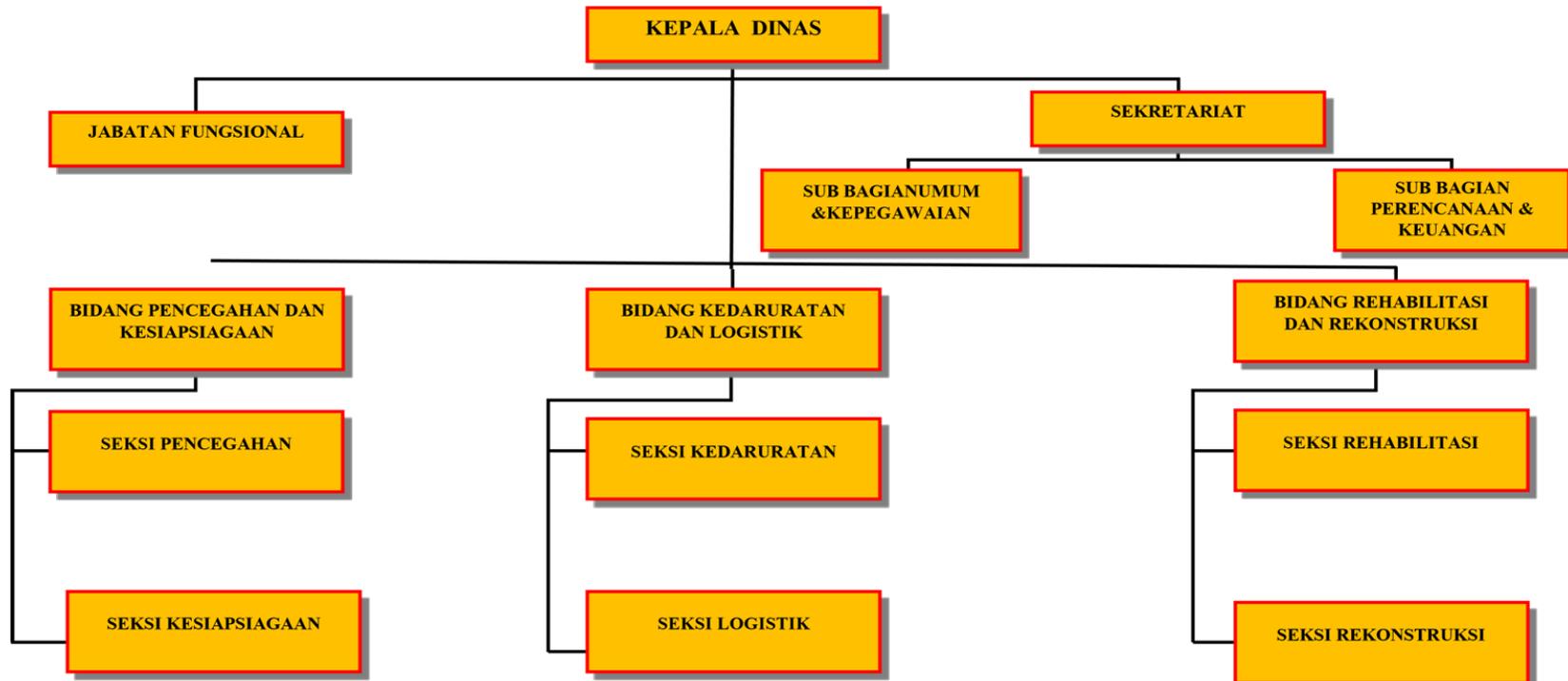
B.3 Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup penanggulangan bencana, penanggulangan darurat dan logistik, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan penanggulangan bencana daerah diawali dengan perumusan perencanaan penanggulangan bencana yang baik. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini BPBD yang membantu Kepala Daerah dalam Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pendanaan terhadap beberapa kegiatan Penanggulangan Bencana;
2. Belum optimalnya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

D. ISU STRATEGIS

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut mengandung tujuan dan sasaran perangkat daerah, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misi Bupati Terpilih 2018 -2023 Kabupaten Jayawijaya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja

perangkat daerah. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 -2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang – undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

BPBD mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berdasar urusan dan

program yang diampu, BPBD mendukung pencapaian misi Kabupaten Jayawijaya yang tercantum pada RPJMD yaitu : *misi* , **Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, dengan tujuan BPBD meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat.** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya mengampuh dua fungsi penunjang urusan yaitu fungsi penunjang **Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dan fungsi penunjang **Program Penanggulangan Bencana**. Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indicator – indicator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama BPBD sebanyak 2(dua) indikator.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	IKU	Cara Perhitungan	Target 2023
1	2	3	4
1	Indeks Resiko Bencana	$\frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	80,64
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} * 100\%$	80%

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Tahun 2018 – 2023. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2023 meliputi 2 (dua) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target				Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	1	Indeks Risiko Bencana	Nilai	0	0	0	99,82	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	
			2						Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Pelayanan Informasi Bencana Kabupaten /Kota	Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia
										1. Penyusunan kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebencanaan
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPBD								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	

		1	Predikat Evaluasi SAKIP BPBD	Nilai	0	0	0	69,84 (B)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja BPBD
									1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada BPBD	%	0	0	0	0		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja BPBD bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja $>95\%$ sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja $>80\%$ sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja $>50\%$ sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja $<50\%$ = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing – masing indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023

1	2	3	4	5	Target Kinerja Sasaran		8	9	10
					6	7			
Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Predikat		
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	1	Indeks Risiko Bencana	Bahaya* $\frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	%	80,64	115,2	70%	Cukup Berhasil
		2	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} \times 100\%$	%	80%	28,92%	36,15%	Kurang Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPBD	1	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	$\frac{\text{Jumlah anggaran temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD}}{\text{Total anggaran yang terealisasi pada BPBD}} \times 100\%$	%	0	0	100%	Sangat Berhasil
		2	Nilai SAKIP	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Nilai SAKIP BPBD	75 (BB)	69,84 (B)	93,12%	Berhasil

Catatan : Merupakan indikator yang menjadi PK eselon 2 dan Eselon 3

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis dibandingkan indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis.

Tabel 3.2
Realisasi IKU Tahun 2023

Sasaran		Indikator Sasaran		Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Predikat
					Satuan	Target 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	1	Indeks Risiko Bencana	$\frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	%	80,64	115,2	70%	Cukup Berhasil
		2	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} * 100\%$	%	80%	28,92%	36,15%	Kurang Berhasil

2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

Pencapaian Kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis BPBD sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2018 – 2023. Pencapaian kinerja tahun ke – 5 (lima) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun kedua periode Renstra untuk mengetahui kecenderungan / trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi / capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran		Indikator sasaran		Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	1	Indeks Risiko Bencana	$\frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	%	80	70
		2	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} \times 100\%$	%	60	36,15

3. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2023 (akhir periode Renstra)

Indikator kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2018 – 2023. Pencapaian kinerja tahun kedua (2023) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2023) untuk mengetahui kemampuan BPBD selama 2 (dua) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi / capaian kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 dan
Target Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)

Sasaran		Indikator sasaran		Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	1	Indeks Risiko Bencana	$\frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	%	115,2	115,2
		2	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} \times 100\%$	%	80	28,92
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPBD	1	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	$\frac{\text{Jumlah anggaran temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD}}{\text{Total anggaran yang terealisasi pada BPBD}} \times 100\%$	%	0	100
		2	Nilai SAKIP	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Nilai SAKIP BPBD	70,86 (BB)	68,94 (B)

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

4.1 Sasaran 1 :

“Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana”.

Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana** melalui 2 (dua) indikator kinerja, mendapatkan angka rata – rata tingkat capaian kinerja sebesar 53,1% dengan predikat Cukup Berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Indikator 1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4
Indeks Risiko Bencana	80,64	115,2	70%

Berdasarkan analisis terhadap Indeks Risiko Bencana kategori Cukup baik, realisasi sebesar 115,2 dari target 80,64 Realisasi ini dilihat dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari . IRB Kabupaten Jayawijaya tersebut menggambarkan penanganan bencana di Kabupaten Jayawijaya masih tergolong di kategori sedang.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Terlaksananya semua aspek dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari mitigasi, penanggulangan bencana dan penanganan paca bencana.
- b. Tersedianya semua Dokumen Kebencanaan sebagai factor pendukung dalam penanggulangan bencana.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Tersedianya anggaran dalam melaksanakan semua kegiatan yang tercakup dalam penanggulangan bencana.

Gambar 3.1

Dokumen Penyusunan Kajian Risiko



Tabel 3.6 Realisasi Indikator 2 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4
Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	80%	28,92%	36,15%

Berdasarkan analisis terhadap Persentase peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar berada pada kategori kurang baik, realisasi sebesar 28,92% dari target 80%. Realisasi ini dilihat dari jumlah korban bencana yang terfasilitasi dalam penanganan bencana dari jumlah keseluruhan korban bencana di kabupaten Jayawijaya.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Adanya respon cepat dari tim tanggap darurat bencana dan pendistribusian bantuan logistik kepada korban bencana serta penyelamatan terhadap korban bencana.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

- a. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan penanganan bencana dan untuk penyediaan logistik pada kantor BPBD untuk meringkas prosedur pemberian bantuan logistik.

Gambar 3.2

Dokumentasi Penanganan Bencana Banjir



5. Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

Rencana belanja dalam pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran tahun 2023 dengan Belanja sebesar **Rp 700.000.00** dengan realisasi **Rp 698.730.000** dengan tingkat capaian 99,82 %, masuk kategori efisien.

Tabel 3.10
Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)

No	Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi keuangan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyusunan kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100	99,82	Efisien

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai P – APBD tahun anggaran 2023 BPBD Kabupaten Jayawijaya mengelola anggaran sebesar **Rp 2.659.629.292,00** yang

terdiri dari Belanja operasi dan Belanja Barang / Jasa / modal. Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja modal digunakan membiayai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Jayawijaya. Realisasi keuangan belanja sebesar 88,65% dengan penyerapan dana sebesar **Rp 2.357.693.283,00** Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, BPBD melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2023 adalah realisasi fisik sebesar 89%.

Tabel dari realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Menurut Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi keuangan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (renstra dan renja)	100	99,53	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	97,57	Efisien
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	90,47	Efisien
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	99,05	Efisien
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100	99,20	Efisien
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	100	Efisien
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	Efisien
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,97	95,58	Efisien
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,44	52,37	Efisien
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	Efisien
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83,33	39,59	Tidak Efisien

13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	Tidak Efisien
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	99,53	Efisien
15	Penyusunan kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1001	99,82	Efisien

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia							
1	meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	700.000.000,00	698.730.000,00	99,82
			Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	700.000.000,00	698.730.000,00	99,82
				1.Penyusunan kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	700.000.000,00	698.730.000,00	99,82
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPBD	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada BPBD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.501.226.292,00	1.361.229.154,00	82,30
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.465.834.292,00	1.326.127.154,00	90,47
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.270.000,00	5.220.000,00	99,05

				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	30.122.000,00	29.882.000,00	99.20
			Predikat Evaluasi SAKIP BPBD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.042.000,00	71.422.000,00	93,09
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.393.000,00	51.153.000,00	99.53
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.995.000,00	4.995.000,00	100
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.654.000,00	15.274.000,00	97.57

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, BPBD Kabupaten Jayawijaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 sebagai cerminan dari hasil kinerja BPBD selama 1 (satu) tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Jayawijaya tahun 2023, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya berhasil dari target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil BPBD Jayawijaya.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala – kendala teknis. Adapun kendala – kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.